

# STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN ROKAN HILIR

**Leo Alhaksbi**

Email: leoalhaksbi@yahoo.com

**Dibimbing oleh Dra. Ernawati M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

## ***Abstract***

*The research present describe the optimalization of market retribution. From the market retribution data, in 2009 realization of market retribution has a target, but in 2010 until 2013 the market retribution was never get a target realization by Clean, Park and Market Agency Rokan Hilir Agency. The decrease of market retribution cause of some factor by minimalization of market retribution, minimalization of human resources in market retribution and the other factors.*

*The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Rokan Hilir Regency and researcher collect data from books, government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan likes Head of Clean, Park and Market Agency Rokan Hilir Agency, Head of section Clean, Park and Market Agency Rokan Hilir Agency, staff of market retribution and retributors.*

*The conclusion of this research are strategy of Clean, Park and Market Agency Rokan Hilir Agency to optimlaization of market retribution are values strategy, planning strategy, position strategy, vision mission strategy and tactics step strategy. The factors that influence of strategy of Clean, Park and Market Agency Rokan Hilir Agency to optimlaization of market retribution are minims of coordination with the other agency, minimize of socialization of regulation, minimize of controlling agency, staff positioning of agency and minimize of insentive for staff retributors.*

**Keywords:** *market retributions, optimalization strategy and influence factors.*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian administrasi yang menganalisis mengenai strategi optimalisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai strategi optimalisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, teknik dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Kerangka teori dibutuhkan peneliti untuk menelaah permasalahan penelitian dengan lebih terperinci. Selain itu kerangka teori juga berguna bagi peneliti untuk menyimpulkan

hasil penelitian dan menemukan hipotesis penelitian ini.

Menurut O'Toole dalam Jhon M. Bryson (2005:25) strategi berasal dari kata *stratego* dalam bahasa Yunani, gabungan dengan *stragos* atau tentara, dan *ego* atau pemimpin. Menurut Freed R. David (2006:8) strategi manajemen adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu mengaitkan keunggulan, strategi pemerintah dengan tantangan lingkungan dan direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh penyelenggaraan pemerintah.

Strategi merupakan alat atau sasaran untuk mencapai tujuan akhir "sasaran" akan tetapi strategi adalah rencana yang disatukan dan strategi itu dapat mengikat semua bagian dari penyelenggara pemerintah menjadi satu strategi itu menyeluruh dan strategi meliputi semua aspek penting dalam pemerintah maupun penasehat swasta serta strategi itu terpadu semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian (Freed R. David 2006:11). Selanjutnya menurut Freedy Rangkuti (2003:16) pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe antara lain :

1. Strategi manajemen

Strategi manajemen adalah meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen pemerintahan dengan orientasi pengembangan strategi secara

makro misalnya strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi diskusi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan dan seterusnya.

## 2. Strategi investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi investasi misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau perusahaan, strategi pengembangan kembali suatu visi baru atau strategi diinvestasi dan sebagainya.

## 3. Strategi bisnis

Strategi ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi organisasi dan strategi yang berhubungan dengan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa bentuk yang bertujuan sama yang mana tujuannya adalah pencapaian tujuan akhir dari suatu organisasi dalam tindakan yang bersifat senantiasa mengikat dan terus menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang masing-masing orang atau para pelanggan untuk kedepan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dengan kata “apa yang dapat terjadi? “bukan dimulai dari kata” apa yang terjadi?” (Hamel dan Prahalad 2007:21).

Selanjutnya menurut Mintzberg dalam bukunya Aimee (2010:54) konsep strategi itu sekarang – kurangnya mencakup 5 arti yang saling berkaitan dimana strategi terdiri atas beberapa kompponen, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan yang merupakan suatu upaya untuk semakin memperjelas arah yang ingin dan akan ditempuh oleh sebuah organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan - tujuan jangka panjangnya.
2. Acuan berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan yang akan dicapai.
3. Pemosisian atau penempatan posisi pegawai atau staff sesuai dengan kemampuan dan keahliannya yang dipilih oleh organisasi saat akan memunculkan atau melakukan aktifitasnya.
4. Suatu perspektif menyangkut visi organisasi yang terintegritas antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas – batas bagi aktivitas sebuah organisasi.
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi

informasi untuk mengelabui para pesaing ataupun oposan.

Selanjutnya strategi menurut (Salusu. 2006:101) ada empat tingkat strategi dikeseluruhannya disebut dengan master strategi antara lain:

#### 1. *Enterprise strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berda diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol.

#### 2. *Corporate strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh organisasi.

#### 3. *Business strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana pasaran ditengah masyarakat bagaimana menetapkan organisasi ditengah para pengusaha (pemerintah), para pengusaha, para legeslatif, para politisi dan sebagainya.

#### 4. *Fungtional strategy*

Strategi merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain, ada tiga jenis strategi fungsional, anantara lain:

- a. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat antara lain

yang berkaitan dengan keuangan, memasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.

- b. Strategi fungsional manajemen yaitu mencakup fingsi-fungsi manajemen yaitu: *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, motivating, comunicating, decision making, representing, dan intregrating.*
- c. Strategi isu strategik, fungsi utamanya adalah mengontrol lingkungan, baik lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui maupun situasi yang berubah.

Seperti yang dikatakan Byson (2004:4) bahwa strategi manajemen pemerintah dapat membantu suatu organisasi satuan kerja dibawahnya dalam hal:

1. Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif buat penyelenggaraan pemerintah
2. Memperjelas arahan masa depan organisasi
3. Menciptakan prioritas manajemen berbasis kinerja
4. Membuat keputusan sekarang dengan mengikat

konsekuensi masa depan organisasi

5. Mengembangkan landasan yang kokoh bagi pembuat keputusan
6. Menggunakan kelulusan yang maksimum dalam bidang-bidang benda dibawah kontrol organisasi diatasnya
7. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.
8. Memecahkan masalah utama organisasi
9. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.
10. Membangun kerja kelompok dan keahlian

Selanjutnya menurut pengelolaan Peraturan Daerah tersebut diatas bahwa pelayanan retribusi pasar oleh pemerintah daerah yang dikonsentrasikan pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir. Bersama pihak dinas untuk mencapai tujuan agar pelayanan retribusi pasar dapat tercapai dikabupaten Rokan Hilir bersama jajaranya melakukan strategi fungsional manajemen berupa perencanaan, pengawasan, komunikasi, pengambil keputusan, motivasi kerja, dan integritas serta pelaksanaan kerja.

Bagaimana misi organisasi Dinas Kebersihan Pertamanan dan

Pasar dalam merumuskan strategi yang berperan penting dalam menentukan tujuan strategi kebijakan organisasi pemerintahan mengimplementasikan strategi dan kebijakan tersebut melalui program kerja, evaluasi kinerja dan memastikan tepatnya pengendalian aktifitas organisasi pemerintahan (Sufian hamim 2005:21) Berdasarkan konsep teori manajemen strategi tampaknya dengan jelas ada keterkaitan unsur manajemen dengan perencanaan strategi, merupakan fungsi pokok dan sangat mendasar. Melaksanakan strategi tersebut diatas, tidak dapat dilakukan dengan baik apabila dalam pengelolaan manajemennya tidak efektif dan efesien, hal ini sesuai dengan dikatakan oleh Bintaro Djokroaminto (2004:68) menyatakan bahwa manajemen kebijakan strategi terdiri dari bagian antara lain:

- a. Manajemen pengawasan kebijakan strategi
- b. Manajemen pelaksanaan dan pengendalian kebijakan
- c. Keterampilan dan kemampuannya, baik kemampuan profesional maupun manajereal.
- d. Mempunyai dedikasi dan motifasi, mengabdikan melaksanakan tugas, menunaikan amanat, serta sikap pelayanan kepada masyarakat.

- e. Sikap mental mempunyai etos kerja, tertip, tangguh, jujur, disiplin, kerja keras, produktif, inovatif, dan berorientasi pada kinerja.

Uraian diatas menggambarkan, selain dari kualitas sumber daya manusia yang terlihat dalam suatu kegiatan melalui pelatihan dan pendidikan juga memantapkan manajemen aparatur pemerintahan turut ambil bagian-bagian sebagai mana yang telah diuraikan diatas. Analisa perumusan strategi pemerintah daerah dalam mengendalikan retribusi, strategi yang dikembangkan adalah pada penekanan peningkatan kualitas SDM, aparat pemerintah dan partisipasi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat melalui proses pembelajaran.

Menurut Andrews dalam Freedy Rangkuti (2003:4) strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholder (pemangku kepentingan) seperti Manajer, karyawan, konsumen, komunitas dan pemerintah lainnya selanjutnya menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan / organisasi pemerintah serta pendayagunaan dan alokasi sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan, konsep-konsep lain yang berkaitan sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun.

Lebih lanjut bahwa perencanaan yang strategis sebagai upaya yang disiplin untuk membuat

keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan hal yang seperti itu yang terbaik perencanaan strategi mengisaratkan pengumpulan informasi secara luas eksploasi alternative dan menekankan implementasi masa depan keputusan sekarang (Bryson 2005:4).

Kemudian S. Munawir dalam buku Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1994:205 mengatakan bahwa :“Retribusi yaitu Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.” Lain halnya menurut Marihot P. Siahaan (2005:5) bahwa merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Sedangkan menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan. Dari pendapat para ahli diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa retribusi merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Demikian pula, dari pendapat-pendapat diatas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh Daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.

2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, secara umum peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Dengan mengetahui isu-isu strategi



yang dihadapi oleh instansi pengelola retribusi pasar Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, organisasi tersebut diharapkan mampu memformulasikan strategi yang paling tepat dan paling sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh organisasi, sehingga peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat terwujud. Dan perlu diingat bahwa setiap strategi yang efektif akan membangun kekuatan dan mampu mengambil keuntungan dari peluang seraya meminimalkan atau mengatasi kelemahan dan ancaman/tantangan yang ada. Secara umum konsep peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu upaya ekstensifikasi dan intensifikasi.

#### 1. Upaya Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. Sedangkan ekstensifikasi pajak/retribusi menurut Soemitro (1988:384) adalah :

- a. Penambahan pajak/retribusi baru dengan menemukan wajib obyek pajak/retribusi baru,
- b. Menciptakan pajak-pajak/retribusi baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

#### 2. Upaya Intensifikasi

Intensifikasi memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Ada pun langkah-langkah

intensifikasi, berdasarkan Sari Kajian dan Moneter (1996:39) ”dimaksudkan untuk mengefektifkan pemungutan pajak terhadap subyek dan obyek pajak/retribusi yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi pajak/retribusi lainnya”. Selanjutnya menurut Soemitro (1988:77), sistem intensifikasi pajak/retribusi maksudnya untuk meningkatkan pajak/retribusi dengan mengintensifkan segi-segi:

- a. Intensifikasi perundang-undangannya
- b. Meningkatkan kepastian hukum
- c. Mengintensifkan peraturan pelaksanaan
- d. Meningkatkan mutu aparatur
- e. Meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organ/struktur perpajakan/retribusi sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

### PEMBAHASAN

Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah di Kabupaten Rokan Hilir pada khususnya dan daerah-daerah lain pada umumnya. Besarnya retribusi daerah sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, optimalisasi retribusi pasar sebagai salah satu retribusi daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir melakukan beberapa strategi optimalisasi, yaitu sebagai berikut:

### **1. Strategi Perencanaan**

Strategi perencanaan merupakan strategi awal dalam sebuah upaya peningkatan pencapaian target. Perencanaan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan realisasi dari yang sudah ditetapkan oleh sebuah pihak dalam mencapai target yang diinginkan. Pasar yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Daerah diurus, dikelola dan dibina oleh Pemerintah Daerah sedangkan pasar desa diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

#### **A. Meningkatkan Kemitraan dengan Instansi Lain**

Dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi pasar, kemitraan dengan instansi lain perlu dilakukan. Hal ini berkaitan dengan semakin mudahnya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar menertibkan administrasi maupun pelaksanaan penertiban pedagang. Dalam strategi perencanaan peningkatan retribusi pasar oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang pemungutan

retribusi pasar kepada para pedagang sehingga pedagang memahami dasar hukum kewajiban membayar retribusi sehingga mereka memahami tentang konsep retribusi, hak – haknya, dan sanksi – sanksi yang akan diterima jika tidak menaati peraturan tersebut.

### **2. Strategi Penilaian**

Dalam perumusan strategi peningkatan penerimaan retribusi pasar dibutuhkan suatu penilaian dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sebagai tindak lanjut diberlakukannya kebijakan dan peraturan yang ada.

#### **A. Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Retribusi**

Monitoring atau pengawasan penting dilakukan dalam upaya meningkatkan ketertiban jalannya suatu alur atau proses. Dalam hal ini, pengawasan sebagai bagian dari strategi penilaian dilakukan terhadap jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi yang dilakukan petugas pemungut retribusi dan pejabat – pejabat yang berwenang. Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi menjadi bagian penting dalam upaya optimalisasi penerimaan retribusi pasar agar permasalahan di lapangan dapat segera dicari solusinya. Selain evaluasi terhadap kinerja petugas pemungut retribusi untuk meminimalisasi penyimpangan, perlu dilakukan juga

evaluasi terhadap sarana dan kemandirian pasar.

### **3. Strategi Penempatan Posisi**

Penerapan strategi penempatan posisi dimaksudkan untuk menempatkan petugas sebagai pemungut retribusi yang memberikan pelayanan terbaik dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dengan mempertimbangkan keahlian dan tingkat pendidikan petugas. Salah satu cara atau strategi yang ditempuh oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir adalah menempatkan posisi pegawai sesuai dengan kompetensi dan jabatan kepangkatannya. Keahlian pegawai, terutama petugas pemungut retribusi sangat mempengaruhi proses pemungutan retribusi yang berdampak pada besarnya penerimaan retribusi pasar.

### **4. Strategi Visi Organisasi**

Sebagai prosedur dalam menjalankan tujuan dan fungsinya, maka Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir mempunyai Visi yaitu :“ *Terwujudnya pelayanan prima serta terciptanya pasar yang kondusif, kota yang bersih, indah, bersinar dan tertatanya pemakaman serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah*“. Visi ini merupakan tujuan dari kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar.

#### **A. Pelayanan Yang Efisien Dan Efektif**

Dari Visi yang dibuat dapat dilihat bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar berusaha untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, khususnya kepada para pedagang sebagai instansi penanggungjawab retribusi pasar. Sesuai dengan strategi diatas, maka disusunlah kebijakan pembangunan kebersihan, pertamanan dan pasar Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi acuan dalam penerapan program dan kegiatan prioritas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Adapun kegiatan yang dimaksud yaitu:

1. Menumbuhkan iklim pasar yang kondusif melalui upaya pengawasan dan pemberdayaan pelaku pasar agar lebih produktif dan efisien sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan
2. Penguatan sarana dan prasarana kebersihan demi terciptanya armada yang tangguh melalui pengembangan dan pelatihan Sumber Daya Manusia.
3. Mengembangkan wilayah-wilayah potensial kearah sentra keindahan sehingga menciptakan suasana sejuk dan nyaman dengan penataan yang bertumpu pada nilai - nilai estetika.

Berdasarkan wawancara diatas, maka pelaksanaan visi dan misi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar oleh petugas berupa kinerja yang jujur, rapi,

teliti dan profesional, sehingga petugas penghitung retribusi dapat memperkecil kesalahan. Selain itu, para pedagang mengharapkan peningkatan pelayanan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar melalui peningkatan keamanan, ketertiban, kebersihan dan penambahan fasilitas.

### **B. Menciptakan Iklim Yang Kondusif**

Dalam rangka mewujudkan visinya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar berupaya untuk selalu menciptakan iklim pasar yang kondusif sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman untuk para pedagang maupun pembeli. Terciptanya iklim pasar yang kondusif sangat dipengaruhi oleh keamanan dan kenyamanan pasar. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar berusaha untuk selalu meningkatkan fasilitas pasar baik sarana dan prasarana maupun keamanan pasar. Sebagai penanggungjawab retribusi pasar, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar selalu berusaha menampung keluhan pedagang pasar dan memberikan solusi demi terciptanya iklim pasar yang kondusif yang akan berdampak pada optimalnya penerimaan retribusi.

### **5. Strategi Langkah Taktis**

Strategi langkah taktis yang dilakukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar dilakukan melalui upaya penyediaan informasi

jumlah wajib pajak retribusi dan pendataan jumlah wajib retribusi.

### **A. Adanya Informasi Jumlah Wajib Retribusi**

Adanya informasi jumlah wajib pajak dari suatu pasar sangat dibutuhkan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar sebagai data primer yang menjadi dasar pemungutan retribusi. Data dan informasi yang lengkap ini diharapkan dapat menjadi dasar penetapan target penerimaan yang realistis. Selain itu, data dan informasi tersebut diperlukan oleh petugas pemungut retribusi sebagai data pemungutan agar proses pemungutan retribusi lebih tertur dan terarah.

### **B. Adanya Pendataan Jumlah Wajib Retribusi**

Pendataan jumlah wajib retribusi merupakan salah satu strategi langkah taktis yang dapat ditempuh oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi. Langkah ini merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap pedagang sebagai wajib retribusi dari seluruh pasar yang di Kabupaten Rokan Hilir.

Hasil pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Dinas kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir, sejak tahun 2009-2013 bersifat fluktuatif dan mengalami

penurunan target dari realisasi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun faktor-faktor yang menghambat strategi optimalisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

### **1. Dari Sisi Perencanaan**

Minimnya kemitraan yang dijalin dengan instansi lain dan masih kurangnya sosialisasi peraturan daerah mengenai kewajiban retribusi pasar menjadi faktor penghambat optimalisasi penerimaan retribusi. Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar dengan instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Rokan Hilir tentu saja dapat berdampak pada peningkatan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Rokan Hilir.

Masih kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar kepada wajib retribusi/pedagang menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi penerimaan retribusi pasar.

### **2. Dari Sisi Penilaian**

Penilaian merupakan tindak lanjut dari adanya kebijakan atau peraturan yang diberlakukan. Tidak adanya penilaian yang baik akan berakibat tidak optimalnya penerimaan retribusi.

#### **A. Faktor Minimnya Pengawasan Oleh Dinas**

#### **Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemungutan Retribusi**

Monitoring atau pengawasan merupakan strategi penting yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti dan mengetahui sejauh mana peraturan dapat diterapkan. Monitoring yang telah dilakukan merupakan upaya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar untuk mengoptimalkan kinerja petugas dan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan pedagang pada khususnya. Penelitian langsung di lapangan melalui pengamatan dan wawancara diperoleh informasi, bahwa terdapat beberapa penyimpangan dalam pemungutan retribusi karena banyak pedagang yang tidak membayar retribusi atau pedagang tidak mendapatkan karcis. Selain itu, lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran yang dilakukan pegawai/petugas dan/atau wajib retribusi menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah sehingga kondisi tersebut yang justru membuka peluang bagi kedua pihak untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran.

#### **B. Minimnya Evaluasi Terhadap Kinerja Pegawai Pemungut Retribusi**

Evaluasi merupakan tindak lanjut dari proses monitoring/pengawasan terhadap kinerja pegawai pemungut retribusi untuk

mencari solusi – solusi dari permasalahan yang ada.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat dihasilkan beberapa kesimpulan bahwa strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi perencanaan masih kurang optimal terutama masih kurangnya Sosialisasi Peraturan Daerah terhadap wajib retribusi serta masih kurangnya koordinasi dengan instansi lain seperti dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
2. Strategi penilaian belum optimal dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja petugas pemungut retribusi pasar
3. Strategi penempatan posisi petugas pemungut retribusi kurang sesuai dengan tugasnya karena sebagian besar pendidikan terakhir petugas adalah SMA, masih kurangnya pelayanan petugas pemungut terhadap wajib retribusi dan kurangnya pendataan terhadap wajib retribusi pasar.

Sedangkan beberapa faktor yang mempengaruhi strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan, berupa Minimnya kemitraan dengan instansi lain dan kurangnya sosialisasi peraturan daerah kepada wajib retribusi / pedagang.
- b. Penilaian, berupa kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dan minimnya evaluasi terhadap kinerja pegawai pemungut retribusi.
- c. Penetapan posisi, berupa penempatan posisi pegawai yang tidak sesuai dengan pendidikan dan tidak adanya insentif tambahan bagi petugas pemungut retribusi

Sesuai dengan tujuan penelitian ini mengenai strategi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar dalam optimalisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Rokan Hilir, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya koordinasi yang intensif dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir dengan instansi lainnya seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan serta mengadakan sosialisasi kepada wajib

retribusi agar wajib retribusi memahami arti penting pemungutan retribusi.

2. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir seharusnya mengadakan pengawasan sebulan sekali terhadap wajib retribusi maupun terhadap petugas retribusi pasar dan melakukan evaluasi laporan dari petugas pemungut.
3. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir disarankan untuk menempatkan petugas operasional pemungut retribusi pasar sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki seperti mengadakan pelatihan mengenai perpajakan dan memberikan insentif kepada petugas operasional pemungut retribusi sesuai dengan jam kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Blakely, Edward J., 1989, "*Planning Local Economic Development (Theory and Practice)*", Sage Publication, Inc, Newbury Park, California
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1993, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian, Usaha Nasional*, Surabaya. (Diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi)
- Bryson, J. M. 2001. *Strategi Planing Publik and Non Provit Organization*, Penerbit PT. Elekmedia Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2004. *Perencanaan Strategi*, Jakarta. Penerbit Bina Aksara
- Davey, 1988, "*Pembiayaan Pemerintahan Daerah*", UI-Press, Jakarta
- David, Fred. R, 2006. *Strategi Manajemen*, Jakarta. Penerbit balai Pustaka.
- Djokrominoto, Bintaro. 2004. *Manajemen Strategi*. Jakarta. Penerbit Gramedia Pustaka
- Dwiyanto, Agus, 1995, "*Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*", Makalah disajikan pada Seminar Sehari Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Fisipol UGM, Yogyakarta
- Hamin, Sufian. 2003. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia Pustaka
- Heene, Aimee dan Sbastian Desmidt. 2010, "*Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*", Bandung : PT Refika Aditama

- Kaho, J. Riwu, 1988, *“Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah”*, Bina Aksara, Jakarta
- , 1997, *“Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”*, Gramedia, Jakarta.
- Mamesah, D.J., 1995, *“Sistem Administrasi Keuangan Daerah”*, Gramedia, Jakarta
- Moenir. H.A.S, 2006. *Pelayanan Terpadu Perizinan*. Yogyakarta. Penerbit Obor Yogyakarta
- Moleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Munawir, s., 1992, *“Perpajakan”*, Liberty, Yogyakarta
- Nasution, S, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung
- Nawawi, Hadari. 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada. University Press: Jogjakarta.
- Rangkuti, Freedy, 2006. *Kebijakan Strategi*. Jakarta. Penerbit ISBN
- , 2004, *Materi Pokok Kebijakan Publik*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas terbuka, Jakarta.
- Salusu J. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. PT Grasindo. Jakarta.
- Sidik, Machfud, 1999, *“Indonesia Antara Akumulasi Krisis dan Tuntutan Reformasi”*, LP3NI, Jakarta
- Soemitro, Rochmat, 1988, *“Pajak dan Pembangunan”*, PT. Eresco, Bandung
- Sutarto, 2006, *“Dasar-dasar Organisasi”*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Wylie, Harry L., 1958, *“Management Handbook”*, Ronald Press, New York.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.